

BAB III

**PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM MEWUJUDKAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA
TAHUN 2016-2017**

Visi Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2016-2021 sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Tojo Una-Una Yang Hebat di Bidang Pertanian, Pariwisata, dan Kemaritiman”

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Tojo Una-Una periode 2016-2021, maka misi Kabupaten Tojo Una-Una adalah :

1. Membangun keberdayaan rakyat serta penataan wilayah pedesaan secara merata, mandiri, dan berkelanjutan yang berbasis ekonomi, pertanian, pariwisata, dan kemaritiman
2. Mewujudkan kelembagaan yang bersih, efisien, efektif, dan akuntabel
3. Mewujudkan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi
4. Mewujudkan pengarusutamaan gender dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat
5. Mengembangkan kemitraan usaha lokal, investasi dan pengembangan infrastruktur.

Dalam mewujudkan visi dan misi yang tertuang di dalam RPJMD, salah satu strategi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una adalah penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender. Strategi ini dilakukan

dalam rangka untuk mewujudkan misi nomor 4 tentang mewujudkan pengarusutamaan gender dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender merupakan salah satu urusan bidang pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una.

Dalam bab ini, peneliti memaparkan hasil analisis yang didapatkan melalui penelitian mengenai penguatan kelembagaan dalam mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2017. Dalam hal ini, fokus dari penguatan kelembagaan dalam mewujudkan pengarusutamaan gender menggunakan 5 dimensi yaitu, struktur organisasi, SDM, Keuangan, Infrastruktur (sarana dan prasarana), dan network (kerjasama). Selain itu, peneliti membahas faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penguatan kelembagaan dalam mewujudkan pengarusutamaan gender Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2017.

A. Penguatan Kelembagaan dalam Mewujudkan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2016-2017

1. Struktur Organisasi

Dimensi organisasi dalam penguatan kelembagaan memfokuskan pada struktur organisasi yang dapat mempengaruhi bagaimana organisasi dapat menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan (Millen, 2004, p. 21). Jadi organisasi memerlukan struktur yang memadai agar dapat menjalankan fungsinya.

Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una masih belum menjadi urusan seluruh instansi. Pengarusutamaan gender

menjadi subordinat dan dijalankan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Hal ini disebabkan oleh implementasi pengarusutamaan gender baru dilaksanakan baru beberapa di Kabupaten Tojo Una-Una karena tuntutan program prioritas dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una periode 2016-2021.

Dalam rangka penguatan kelembagaan dalam mewujudkan pengarusutamaan gender, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una harus memiliki struktur organisasi yang dapat menjalankan fungsi-fungsi pengarusutamaan gender.

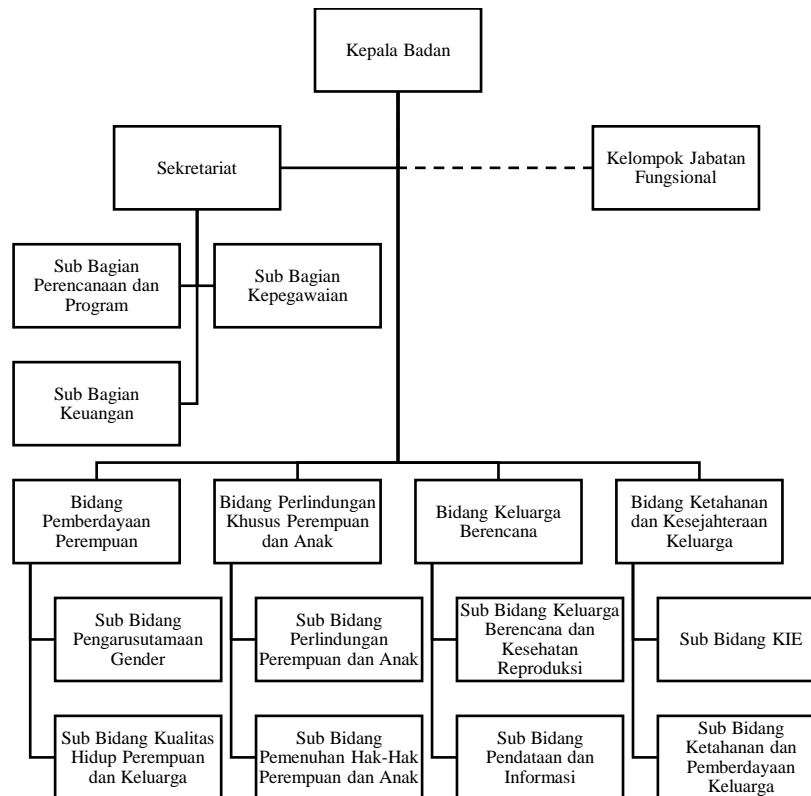
Hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Fridah Ruth Tampake, B.Sc, S.Sos selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una bahwa :

“Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, dan 4 unsur pelaksana bidang dan setiap bidangnya dibagi lagi menjadi sub bagian, unit pelaksana teknis badan dan kelompok jabatan kelompok fungsional .” (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2018 pukul 10.00-12.00 WITA)

Dari penjelasan di atas, kita dapat mengetahui bahwa Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una memiliki struktur yang terdiri dari :

Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017



Sumber: Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana memiliki struktur yang terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, dan 4 unsur pelaksana bidang dan setiap bidangnya dibagi lagi menjadi sub bagian, unit pelaksana teknis badan dan kelompok jabatan

kelompok fungsional. Secara struktur organisasi, Badan Pemberdayaan Perempuan telah siap untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Selanjutnya, Hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Fridah Ruth Tampake, B.Sc, S.Sos selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una bahwa :

“Yang menjalankan fungsi pengarusutamaan gender adalah bidang pemberdayaan perempuan dan didalamnya terdapat sub bidang pengarusutamaan gender yang memang memiliki fungsi dan tugas dalam hal tersebut.” (wawancara dilakukan hari Senin tanggal 9 Januari 2018 pada pukul 10.00-12.00 WITA)

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam di organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una memiliki struktur yang menjalankan fungsi pengarusutamaan gender yang dilakukan oleh bidang pemberdayaan perempuan melalui sub bidang pengarusutamaan gender. Fungsi yang dilakukan oleh Sub Bagian pengarusutamaan gender adalah (Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una 2016-2021, p. 33) :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengarusutamaan gender

- b. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan pengarusutamaan gender
- c. Penyusunan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi dalam kegiatan pengarusutamaan gender
- d. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pengarusutamaan gender

Selain memiliki fungsi diatas, Sub Bidang Pengarusutamaan gender memiliki rincian tugas sebagai berikut (Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una 2016-2021, pp. 33-34) :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Pengarusutamaan Gender
- b. Melaksanakan sosialisasi yang berhubungan dengan pengarusutamaan gender
- c. Melaksanakan advokasi dan fasilitasi bagi pengarusutamaan gender
- d. Melaksanakan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender
- e. Melaksanakan pembinaan organisasi perempuan
- f. Mengembangkan sistem informasi gender
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan fungsi-fungsi pengarusutamaan gender di Badan Pemberdayaan Perempuan masih dilakukan oleh Sub Bidang Pengarusutamaan gender sesuai tugas dan fungsinya. Belum ada Focal Point yang mengurus secara khusus di Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang menjalankan fungsi pengarusutamaan gender sesuai pedoman teknis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjalankan pengarusutamaan gender di daerah. Meskipun jika dilihat secara fungsi dan tugasnya, Sub Bidang Pengarusutamaan Gender di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Focal Point dalam pedoman teknis tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian tentang penguatan kelembagaan yang berfokus pada dimensi organisasi dapat disimpulkan bahwa Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una telah memiliki struktur organisasi yang menjalankan fungsi-fungsi dalam mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una. Fungsi ini dijalankan oleh unit pelaksana bidang pemberdayaan perempuan melalui sub bidang pengarusutamaan gender. Peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2017 sangat penting. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah merupakan pioneer dalam membangun penguatan kelembagaan dalam mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2017.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, perhatian diberikan kepada pengadaan atau penyediaan personel yang profesional dan teknis. Kegiatan yang dilakukan antara lain pendidikan dan latihan (training), maupun sosialisasi (Tim Peneliti STIA LAN MAKASSAR, 2015, p. 15). Jadi, organisasi memerlukan sumber daya manusia yang ahli dan dengan jumlah yang proporsional sehingga dapat menjalankan fungsinya.

Dalam rangka mewujudkan pengarusutamaan gender, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una memerlukan sumber daya manusia yang dapat menjalankan fungsi tersebut. Jumlah pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah sebanyak 42 orang (Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una 2016-2021, p. 40). Kondisi sumber daya manusia Badan Pemberdayaan Perempuan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Jumlah Pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017

NO	Pendidikan	PNS		Non PNS	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	SLTP	-	-	1	-
2	SLTA	2	3	3	3
3	Diploma	1	4	-	-
4	SI/Diploma IV	6	14	2	2
5	S2	-	1	-	-
6	S3	-	-	-	-
Jumlah		9	22	6	5

Sumber: Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021

Pada tabel 3.1 di atas terlihat bahwa jumlah pegawai Badan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebanyak 42 orang yang terdiri dari 15 laki-laki dan 27 perempuan. Untuk tingkat pendidikan Badan Pemberdayaan Perempuan didominasi oleh pegawai yang memiliki tingkat pendidikan S1 berjumlah 24 orang.

Sedangkan untuk kualifikasi Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Kualifikasi Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Tojo Una-Una Berdasarkan Golongan Tahun 2017

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	II	3	3	6
2	III	6	17	23
3	IV	-	2	2
Jumlah				31

Sumber: Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016-2021

Pada tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan didominasi oleh Pegawai bergolongan III. Hal ini dipicu oleh semakin banyaknya aparatur perangkat daerah yang melanjutkan studi ke jenjang pendidikan sarjana baik dengan menempuh kelas maupun yang menempuh pendidikan di luar daerah. Sedangkan untuk golongan IV secara umum memang sangat minim, kondisi ini disebabkan aturan kenaikan pangkat/golongan bagi aparatur pemerintahan struktural sangat lambat, yang hanya naik empat tahun sekali.

Untuk menjalankan fungsi dalam mewujudkan pengarusutamaan gender, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah memiliki bidang pemberdayaan perempuan melalui sub bidang pengarusutamaan gender. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bidang pemberdayaan perempuan memiliki 6 (enam) pegawai sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Fridah Ruth Tampake, B.Sc, S.Sos selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una bahwa:

“Untuk menjalankan tugas dan fungsi pengarusutamaan gender, Bidang pemberdayaan perempuan memiliki 6 pegawai yang terdiri dari satu kepala Bidang, dua kepala Sub Bidang, dan 3 staff pembantu yang terdiri dari 4 perempuan dan 2 laki-laki”.
(wawancara dilakukan hari Senin tanggal 9 Januari pada pukul 10.00-12.00 WITA)

Selain itu, sub bidang pengarusutamaan gender masih berisikan pegawai yang kurang memiliki pengetahuan tentang pengarusutamaan

gender dikarenakan belum adanya kebijakan rekrutmen pegawai yang memiliki pengetahuan tentang pengarusutamaan gender. Akan tetapi, perekrutan pegawai didasarkan pada pegawai yang dianggap mampu menjalankan tugas pengarusutamaan gender. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Fridah Ruth Tampake, B.Sc, S.Sos selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una bahwa:

“Pegawai pelaksana pengarusutamaan gender masih kurang memahami tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender. Pemahaman pengarusutamaan gender memang masih sangat minim bahkan istilah-istilah seperti PPRG, data terpilah dan forum data masih sangat aneh pada awalnya dikarenakan pelaksanaan pengarusutamaan gender masih sangat baru di Kabupaten Tojo Una-Una” (wawancara dilakukan hari Senin tanggal 9 Januari pada pukul 10.00-12.00 WITA)

Salah satu upaya untuk menanggulangi masalah sumber daya manusia dalam mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una adalah pengembangan kapasitas SDM dalam menjalankan fungsi pengarusutamaan gender melalui sosialisasi.

Adapun pengembangan kapasitas SDM melalui sosialisasi dilaksanakan dengan mengikutsertakan aparatur pengarusutamaan gender baik pejabat maupun staff dalam kegiatan yang berbentuk sosialisasi yang membahas tentang PUG untuk menambah pengetahuan, pemahaman dan keahlian baik yang dilaksanakan lembaga pemerintah lainnya yang lebih paham dan mengetahui tentang pengarusutamaan gender itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan ibu Vera Willah, S.Sos selaku kepala sub bidang pengarusutamaan gender bahwa:

“Kami selaku aparaturnya pelaksana pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una telah mengikuti 2 (dua) sosialisasi tentang pengarusutamaan gender. Sosialisasi pertama diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah. Kedua diadakan oleh kami (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una” (wawancara dilakukan hari Senin tanggal 9 Januari pada pukul 13.00-13.30 WITA)

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una telah melaksanakan pengembangan kapasitas SDM melalui sosialisasi yang membahas tentang pengarusutamaan gender. Kedua sosialisasi ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Provinsi Sulawesi Tengah dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una itu sendiri.

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah membahas tentang Peraturan Daerah (perda) Pengarusutamaan Gender di Kota Palu pada tanggal 23 Agustus 2017. Sosialisasi ini mengundang seluruh aparaturnya Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Tengah, salah satunya Kabupaten Tojo Una-Una. Hal ini sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemerintah Daerah yang berada di Sulawesi Tengah dituntut untuk menyelaraskan kebijakan/aturan menggunakan perspektif gender

sesuai dengan agenda Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia dalam mewujudkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Vera Willah, S.Sos selaku kepala sub bidang pengarusutamaan gender bahwa:

“Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mengutus 2 orang untuk mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah. 2 orang ini adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dan Kepala Sub Bidang Pengarusutamaan Gender (saya sendiri)” (wawancara dilakukan hari Senin tanggal 9 Januari pada pukul 13.00-13.30 WITA)

Sosialisasi kedua membahas tentang Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Tahun 2017. Sosialisasi ini dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dan diikuti oleh seluruh OPD yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una. Pelaksanaan kegiatan ini diadakan di Kantor Bupati Kabupaten Tojo Una-Una pada tanggal 27 Oktober 2017. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan kesepahaman tentang isu gender melalui pengarusutamaan gender dan untuk meningkatkan komitmen OPD melalui pelaksanaan kegiatan yang berbasis responsif gender. Hal ini untuk membina setiap OPD Kabupaten Tojo Una-Una mengimplementasikan perumusan berbagai program yang berbasis gender. Pelaksanaan kegiatan ini diadakan melalui kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah untuk memberikan materi dalam sosialisasi ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Vera Willah, S.Sos selaku kepala sub bidang pengarusutamaan gender bahwa:

“Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mengadakan sosialisasi yang bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah. Seluruh OPD di Kabupaten Tojo Una-Una diwajibkan untuk mengirimkan perwakilan untuk menghadiri sosialisasi ini. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una diwakili Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan Kepala Sub Bidang Pengarusutamaan Gender serta 2 staff lainnya” (wawancara dilakukan hari Senin tanggal 9 Januari 2018 pada pukul 13.00-13.30 WITA)

Tabel 3.3

Jumlah Pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang mengikuti kegiatan sosialisasi pengarusutamaan gender tahun 2017

No.	Kegiatan	Penyelenggara	Jumlah
1	Sosialisasi tentang Peraturan Daerah (perda) Pengarusutamaan Gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah	2
2	Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una	4

Sumber: Lkip Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017

Berdasarkan hasil penelitian tentang penguatan kelembagaan yang berfokus pada dimensi sumber daya manusia dapat disimpulkan bahwa Badan Pemberdayaan Perempuan telah melaksanakan pengembangan

kapasitas SDM untuk mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2017. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia dalam mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una masih sangat minim karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang perwujudan pengarusutamaan gender. Secara kuantitas dalam mewujudkan pengarusutamaan gender Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah telah mencukupi meskipun secara kualitas masih sangat kurang. Untuk mengatasi ini, wajib dilakukan upaya seperti mengadakan dan mengikuti sosialisasi yang berhubungan dengan pengarusutamaan gender. Selain itu bisa juga mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pengarusutamaan gender yang diadakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Keuangan

Tugas otonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tersedianya keuangan untuk membantu menjalankan pembangunan (Kaho, 1991, p. 60). Dimensi Keuangan dalam penguatan kelembagaan sangat diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan organisasi. Begitu pula dalam hal ini, untuk mendukung perwujudan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una dibutuhkan dukungan keuangan dan anggaran dari APBD Pemerintah Daerah.

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan pengarusutamaan gender sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, maka kegiatan pengarusutamaan gender di level Kabupaten berasal dari APBD Kabupaten

Tojo Una-Una. Untuk mendukung perwujudan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana selaku lembaga yang mengurus pengarusutamaan gender di Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Untuk tahun anggaran 2017 sendiri, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah memiliki 8 (delapan) program dengan 9 (sembilan) kegiatan yang berhubungan dengan bidang kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Adapun rincian anggaran tahun 2017 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017

No	Program	Uraian kegiatan	Jumlah
1	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Fasilitasi Pengembangan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	Rp. 147.900.000,00-
		Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Rp. 82.734.000,00-
2	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Peningkatan perlindungan perempuan dengan masalah sosial	Rp. 20.478.000,00-
3	Peningkatan Ketahanan Dan Pemberdayaan Keluarga	Pembinaan P2W-KSS-GSI	Rp. 60.273.000,00-
4	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Pembinaan organisasi perempuan	Rp. 200.000.000,00-
5	Keluarga Berencana	Peningkatan Peserta KB Aktif	Rp. 18.450.000,00-
6	Pelayanan Kontrasepsi	Pengadaan Alat Kontrasepsi	Rp. 145.750.000,00-
7	Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak	Pengadaan BKB kit dan Genre kit	Rp. 75.475.000,00-
8	Pemenuhan Hak Anak (PUHA)	Fasilitasi Pemenuhan Hak anak berkebutuhan Khusus	Rp.42.000.000,00-
Jumlah			Rp. 793.030.000,00-

Sumber: Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017

Implementasi pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah terdapat dalam 4 (empat) program dengan 5 (lima) kegiatan. Program dan kegiatan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut (Renja Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017, p. 50-51):

- a. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Dengan kegiatan:

- Fasilitasi Pengembangan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
- Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

- b. Program peningkatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga

Dengan kegiatan:

- Pembinaan P2W-KSS-GSI

- c. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Dengan kegiatan:

- Peningkatan perlindungan perempuan dengan masalah sosial

- d. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Dengan kegiatan:

- Pembinaan organisasi perempuan

Prioritas program pembangunan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2017 masih berada pada tahap awal. Terlihat jelas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada program pengarusutamaan gender diatas masih didominasi oleh kegiatan-kegiatan

pembinaan maupun sosialisasi. Pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una masih membangun kerangka dalam mewujudkan pengarusutamaan gender. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una telah mengalokasikan anggaran untuk mewujudkan pengarusutamaan gender yang dikelola langsung oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Adapun alokasi dana untuk program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

Alokasi Dana untuk Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Tahun 2017

No	Uraian Kegiatan	Anggaran
1	Fasilitasi Pengembangan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	Rp. 147.900.000,00-
2	Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Rp. 82.734.000,00-

Sumber: Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2017

Tabel 3.5 diatas menunjukkan jenis kegiatan pada program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak pada tahun 2017 di Kabupaten Tojo Una-Una dan jumlah anggaran yang digunakan. Pada kegiatan fasilitasi Pengembangan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) menggunakan anggaran sebesar Rp. 147.900.000,00- yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Kegiatan sosialisasi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

melalui Perencanaan Penganggaran dan Responsif Gender (PPRG) menggunakan anggaran sebesar Rp. 82.734.000,00- yang terdiri dari belanja barang dan jasa.

Adapun alokasi dana untuk program peningkatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Alokasi Dana untuk Program Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Tahun 2017

No	Uraian Kegiatan	Anggaran
1	Pembinaan P2W-KSS-GSI	Rp. 60.273.000,00-

Sumber: Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2017

Tabel 3.6 diatas menunjukkan jenis kegiatan pada program peningkatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga tahun 2017 di Kabupaten Tojo Una-Una dan jumlah anggaran yang digunakan. Kegiatan pembinaan P2W-KSS-GSI menggunakan anggaran sebesar Rp. 60.273.000,00- yang terdiri dari belanja barang dan jasa.

Adapun alokasi dana untuk program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Alokasi Dana untuk Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Tahun 2017

No	Uraian Kegiatan	Anggaran
1	Peningkatan perlindungan perempuan dengan masalah sosial	Rp. 20.478.000,00-

Sumber: Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2017

Tabel 3.7 diatas menunjukkan jenis kegiatan pada program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan tahun 2017 di

Kabupaten Tojo Una-Una dan jumlah anggaran yang digunakan. Kegiatan peningkatan perlindungan perempuan dengan masalah sosial menggunakan anggaran sebesar Rp. 20. 478.000,00- yang terdiri dari belanja barang dan jasa.

Adapun alokasi dana untuk program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Alokasi Dana untuk Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Tahun 2017

No	Uraian Kegiatan	Anggaran
1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Rp. 200.000.000,00-

Sumber: Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2017

Tabel 3.8 diatas menunjukkan jenis kegiatan pada program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan tahun 2017 di Kabupaten Tojo Una-Una dan jumlah anggaran yang digunakan. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan menggunakan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00- yang terdiri dari belanja barang dan jasa.

Kabupaten Tojo Una-Una melalui pelaksanaan 4 program dan 5 kegiatan telah menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan pengarusutamaan gender. Komitmen ini tentunya juga didukung oleh pengalokasian anggaran dari APBD yang digunakan untuk mewujudkan pengarusutamaan gender. Adapun inilah rincian keseluruhan dana/anggaran yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

untuk menjalankan program dan kegiatan dalam mewujudkan pengarusutamaan gender sebagai berikut:

Tabel 3.9
Alokasi Dana untuk Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017

No	Program	Uraian Kegiatan	Anggaran
1	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Pengembangan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) 	Rp. 147.900.000,00-
		<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) 	Rp. 82.734.000,00-
2	Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan P2W-KSS-GSI 	Rp. 60.273.000,00-
3	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan perlindungan perempuan dengan masalah sosial 	Rp. 20.478.000,00-
4	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan Organisasi Perempuan 	Rp. 200.000.000,00-
Jumlah			Rp. 511.385.000,00-

Sumber: Lakip Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2017

Berdasarkan hasil penelitian tentang penguatan kelembagaan yang berfokus pada dimensi keuangan dapat disimpulkan bahwa Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 511.385.000,00- dari anggaran tahun 2017 yang dimiliki oleh Badan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp. 793.030.000,00- untuk mewujudkan

pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2017. Badan Pemberdayaan Perempuan telah mengalokasikan anggaran sekitar 64% dari total keseluruhan anggaran pada tahun 2017 yang menunjukkan adanya keseriusan dalam penguatan kelembagaan dimensi keuangan dalam mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una.

4. Sarana dan Prasarana

Faktor-faktor yang mempengaruhi otonomi daerah salah satunya yaitu tersedianya sarana dan prasana yang memadai seperti alat perkantoran, alat transportasi, dan lainnya (Kaho, 1991, p. 60). Fokus dimensi sarana dan prasarana pada penguatan kelembagaan adalah ketersediaan sarana dan prasarana untuk membantu mempermudah pekerjaan sebuah organisasi. Jadi, organisasi memerlukan sarana dan prasarana baik dari segi kualitas maupun jumlah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam rangka untuk mewujudkan pengarusutamaan gender, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una memerlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjalankan fungsi tersebut. Sarana dan prasarana sangat penting dalam hal membantu pekerjaan sebuah organisasi dalam menjalankan fungsinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan ibu Fridah Ruth Tampake, B.Sc, S.Sos selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una bahwa:

“Untuk mendukung kinerja pelayanan perangkat daerah, Badan Pemberdayaan Perempuan memiliki beberapa aset sarana dan prasarana yang terdiri dari tanah dan gedung kantor, mobil, motor, laptop, komputer, dan lain-lain” (wawancara dilakukan pada hari Senin 9 Januari 2018 pada pukul 13.00-13.30 WITA)

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi untuk mencapai tujuannya memiliki sarana dan prasarana sebagai aset organisasi. Adapun rincian lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017

No	Sarana dan Prasarana	Keterangan Kondisi		Jumlah
		Baik	Buruk	
1	Tanah dan Gedung Kantor	1	-	1
2	Bangunan P2TP2	1	-	1
3	Bangunan Gudang	1	-	1
4	Komputer PC	10	5	15
5	Laptop/Notebook	6	-	4
6	Kamera/Digital	1	-	1
7	Printer	6	2	8
8	Infocus + Layar	1	-	1
9	AC	7	-	7
10	Meja	16	3	19
11	Kursi	16	6	22
12	Lemari Arsip	16	1	17
13	Lemari Brankas	1	-	1
14	Kendaraan Roda 2	20	-	20
15	Kendaraan Roda 4	7	-	7
16	Televisi	1	-	1
17	Dispenser	5	-	5
18	Kipas Angin	4	2	6

Sumber: Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021

Ketersediaan aset sarana dan prasarana sebagai pendukung kinerja aparatur pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una yang dapat dilihat pada tabel diatas 3.8, menandakan bahwa ada juga sarana pendukung yang rusak dan memerlukan pergantian. Sebab jika dibiarkan berada dalam kondisi rusak maka akan berdampak pada penurunan kinerja aparatur perangkat daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una itu sendiri.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan ibu Vera Willah, S.Sos selaku kepala sub bidang pengarusutamaan gender bahwa:

“Dalam menjalankan fungsinya dalam mewujudkan pengarusutamaan gender, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menggunakan beberapa sarana dan prasarana yang terdiri dari ruang kantor yang di dalamnya terdapat komputer, laptop, AC, Kipas Angin. Mobil dan motor sebagai alat transportasi pegawai, infocus, laptop, printer untuk menjalankan kegiatan sosialisasi, dan lemari arsip sebagai alat penyimpanan berkas dan dokumen” (wawancara dilakukan pada hari Senin 9 Januari 2018 pada pukul 13.00-13.30 WITA)

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam menjalankan fungsi pengarusutamaan gender Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una membutuhkan sarana dan prasarana yang terdiri dari alat-alat perkantoran seperti ruang kantor, komputer, AC, Kipas Angin Meja, alat-alat transportasi yaitu mobil dan motor, alat-alat komunikasi seperti, infocus, laptop, layar, dan alat

penyimpanan seperti lemari arsip. Berikut tabel sarana dan prasarana dalam menjalankan fungsi mewujudkan pengarusutamaan gender di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una:

Tabel 3.11

Sarana dan Prasarana dalam menjalankan fungsi pengarusutamaan gender di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Alat-Alat Perkantoran	Ruang Kantor	2
		Meja	6
		Kursi	6
		Komputer	3
		Laptop	3
		AC	2
		Kipas Angin	1
		Printer	2
2	Alat-Alat Transportasi	Mobil	2
		Motor	3
3	Alat-Alat Komunikasi	Infocus	1
		Laptop	1
		Printer	1
4	Alat Penyimpanan	Lemari Arsip	4

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Tahun 2017

Berdasarkan hasil penelitian tentang penguatan kelembagaan yang berfokus tentang sarana dan prasarana dapat disimpulkan bahwa Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten

Tojo Una-Una telah memiliki sarana dan prasarana dasar dalam menjalankan fungsinya untuk mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2016-2017.

5. Kerjasama

Suatu organisasi dapat menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan dapat dipercepat melalui bantuan dari pihak eksternal organisasi melalui hubungan kerjasama (Millen, 2004, p. 16]). Jadi organisasi dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka untuk membantu mempercepat tercapainya tujuan tersebut.

Dalam rangka mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah perlu melakukan kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama dengan pihak lain dapat membantu mempercepat tercapainya tujuan untuk mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan ibu Vera Willah, S.Sos selaku kepala sub bidang pengarusutamaan gender bahwa:

“Badan Pemberdayaan Perempuan telah melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una. Ada 3 kerjasama yang dilakukan untuk menjalankan program yang berhubungan dengan pengarusutamaan gender” (wawancara dilakukan pada hari Senin 9 Januari 2018 pada pukul 13.00-13.30 WITA)

Berdasarkan dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) kerjasama yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una untuk membantu menjalankan program-program mewujudkan pengarusutamaan gender pada tahun 2017. Kerjasama yang dilakukan antara lain:

- a. Kerjasama dengan seluruh OPD di Kabupaten Tojo Una-Una untuk mengikuti program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak pada kegiatan sosialisasi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender pada tahun 2017. Bentuk kerjasamanya adalah seluruh OPD diwajibkan mengirimkan perwakilan untuk mengikuti sosialisasi sehingga seluruh OPD dapat mengimplementasikan PPRG ke depannya.
- b. Kerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una tentang pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kerjasama ini dilakukan untuk menjalankan program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dengan kegiatan peningkatan perlindungan perempuan dengan masalah sosial. Setiap lembaga memiliki tugasnya masing-masing dalam kerjasama ini. Tugas lembaga-lembaga ini adalah:

- a) P2TP2A bertanggung jawab:
- 1) Memberikan akses informasi, data, kebijakan lembaga kepada pihak kedua untuk pengembangan program bersama
 - 2) Memberikan pelaporan rutin pelaksanaan program kerjasama dan pertanggungjawaban keuangan kepada pihak kedua
 - 3) Memberikan akses audit keuangan kepada pemberi jasa dalam hal ini pihak kedua
 - 4) Memberikan akses kepada pihak kedua dalam aktivitas sosialisasi, pelatihan, seminar, workshop, dan kegiatan lainnya dalam kerangka peningkatan kapasitas pelayanan terhadap korban kekerasan
- b) Kepolisian daerah Kabupaten Tojo Una-Una bertanggung jawab memberikan akses pendampingan korban kepada tenaga pendamping P2TP2A di setiap tingkatan penanganan kasus diseluruh unit PPA baik di Polres maupun Polsek Kabupaten Tojo Una-Una
- c) Kejaksaan Tinggi Kabupaten Tojo Una-Una bertanggung jawab:
- 1) Memberikan akses dan informasi, data, dan kebijakan kejaksaan dalam penanganan kasus kekerasan di Kabupaten Tojo Una-Una
 - 2) Memberikan akses kepada P2TP2A dalam pelatihan, sosialisasi, seminar, workshop, dan kegiatan lainnya dalam kerangka peningkatan kapasitas pelayanan terhadap korban kekerasan

- 3) Melibatkan P2TP2A dalam kelompok kerja yang dibentuk dalam lingkungan kejaksaan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- d) Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Tojo Una-Una bertanggung jawab:
- 1) Memberikan akses kepada P2TP2A atas informasi, data, dan program-program yang berkaitan dengan penanganan korban kekerasan
 - 2) Memberikan akses kepada P2TP2A untuk melaksanakan program di lingkungan instansi yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan anak
 - 3) Melibatkan P2TP2A dalam program sosialisasi, seminar, pelatihan, dan workshop yang berkaitan dengan issue gender dan dan PUHA (Pengarutamaan Hak Anak)
 - 4) Memberikan akses kepada P2TP2A dalam program kecakapan hidup dan peningkatan keterampilan perempuan dan anak
- e) Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una bertanggung jawab:
- 1) Memberikan akses kepada P2TP2A atas informasi, data dan program-program yang berkaitan dengan penanganan korban kekerasan
 - 2) Memberikan akses kepada P2TP2A dalam pengelolaan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RTPC) sebagai schelter korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

- 3) Memberikan akses kepada P2TP2A dalam kelompok kerja yang dibentuk untuk penanganan kasus kekerasan
 - 4) Memberikan akses kepada P2TP2A atas program pemberdayaan ekonomi terhadap perempuan korban kekerasan dalam bentuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
 - 5) Melibatkan P2TP2A dalam program sosialisasi, seminar, pelatihan, dan workshop yang berkaitan dengan issue gender dan PUHA
 - 6) Menyiapkan tenaga pekerja sosial profesional khusus penanganan kasus kekerasan
- f) Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una bertanggung jawab:
- 1) Menerbitkan kartu khusus korban kekerasan yang berfungsi mengakses penanganan visum, perawatan darurat, perawatan medis, layanan psikologi dan biaya pengobatan gratis di RSUD Ampana Kabupaten Tojo Una-Una kepada seluruh korban kekerasan baik perempuan dan anak yang ditangani dan dirujuk oleh P2TP2A
 - 2) Memberikan akses kepada P2TP2A dalam kelompok kerja yang dibentuk Dinas dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 3) Memberikan akses kepada P2TP2A atas informasi, data, dan program-program yang berkaitan dengan penanganan korban kekerasan

- 4) Melibatkan P2TP2A dalam program sosialisasi, seminar, pelatihan, dan workshop yang berkaitan dengan issue kesehatan ibu dan anak, gender serta PUHA
- g) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una bertanggung jawab:
- 1) Memberikan akses kepada P2TP2A atas informasi, data dan program-program yang berkaitan dengan penanganan korban kekerasan
 - 2) Melibatkan P2TP2A dalam program sosialisasi, seminar, pelatihan, dan workshop yang berkaitan dengan layanan pembinaan keagamaan dan issue gender serta PUHA
 - 3) Menyiapkan tenaga rohaniawan pendamping korban-korban kekerasan.
- h) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una bertanggungjawab:
- 1) Memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik
 - 2) Mengadakan pelatihan-pelatihan para kader yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak di segala bidang
 - 3) Bekerjasama dan ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu wadah peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak

- 4) Menyediakan informasi terkait perempuan dan anak, termasuk data terpilah bagi masyarakat yang membutuhkan
- 5) Mendorong tersedianya sarana dan prasarana serta berbagai jenis layanan yang dibutuhkan P2TP2A dengan menyertakan lembaga/stakeholder yang terkait dengan MoU, pemerhati perempuan dan anak
- 6) Membangun mekanisme dialog antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha sehingga terbangun kerjasama yang dapat mendukung keberadaan P2TP2A Kabupaten Tojo Una-Una
- 7) Memberikan akses kepada P2TP2A atas informasi, data, dan program-program yang berkaitan dengan penanganan korban kekerasan
- 8) Menerima laporan pengaduan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 9) Merujuk laporan pengaduan kepada pusat krisis terpadu bila diperlukan
- 10) Menyalurkan ke LBH/rumah aman bila diperlukan
- 11) Mengadakan koordinasi eksternal/internal yang berkaitan dengan pelaksanaan program P2TP2A
- 12) Memberikan akses kepastian dan tindak lanjut pada pelapor korban kekerasan
- 13) Menjamin kerahasiaan, keamanan dan keselamatan terhadap korban/pelapor

14) Membuat laporan perkembangan terhadap kegiatan P2TP2A
Kabupaten Tojo Una-Una

15) Memberikan pelayanan yang berkaitan dengan pemberdayaan
terhadap korban

- c. Kerjasama yang ketiga yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dengan organisasi-organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una. Kerjasama ini dilakukan untuk menjalankan program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan melalui kegiatan pembinaan terhadap organisasi perempuan. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una akan memberikan pembinaan terhadap organisasi perempuan tentang perlunya keikutsertaan perempuan dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian penguatan kelembagaan yang berfokus pada dimensi kerjasama dapat disimpulkan bahwa Badan Pemberdayaan Perempuan telah melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka untuk mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2016-2017.

Jika melihat secara keseluruhan hasil penelitian penguatan kelembagaan dalam mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una dapat disimpulkan bahwa penguatan kelembagaan yang berdasarkan 5 dimensi struktur organisasi, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana dan kerjasama (network) masih berada pada tahap

awal dan masih memiliki banyak kekurangan. Indikator yang paling menunjukkan keseriusan adalah dari dimensi keuangan dan kerjasama yang terealisasi melalui alokasi anggaran dan adanya bentuk kerjasama dari pihak eksternal Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una itu Sendiri. Sedangkan untuk dimensi SDM, Struktur organisasi dan Sarana dan Prasarana masih dibutuhkan banyak perhatian dalam upaya mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2017.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penguatan Kelembagaan dalam Mewujudkan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017

Penguatan kelembagaan dalam sebuah organisasi tak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Disini penulis akan membagi faktor-faktor yang mempengaruhi menjadi dua, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penguatan kelembagaan dalam mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2017:

1. Faktor Pendukung

a. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah elemen penting dalam berjalannya sebuah organisasi. Dengan kepemimpinan yang kondusif maka menjadi pemicu bagi setiap elemen organisasi dalam

mengembangkan kapasitasnya (Rivai, 2011, p. 165). Kepemimpinan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penguatan kelembagaan dalam mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una.

Hal ini terlihat dari komitmen Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una yang menjadikan pengarusutamaan gender menjadi salah satu misi dari penjabaran visi mereka selama 5 tahun yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una periode 2016-2021.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Fridah Ruth Tampake, B.Sc, S.Sos selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una bahwa :

“Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender tak terlepas dari visi dan misi Bupati Tojo Una-Una yang memasukkan pengarusutamaan gender sebagai misinya. Hal ini kemudian direalisasikan dengan komitmen melalui pengadaan anggaran untuk pengarusutamaan gender dan bentuk dukungan terhadap program-program yang dicanangkan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah” (wawancara dilakukan hari Senin tanggal 9 Januari 2018 pada pukul 10.00-12.00 WITA)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam penguatan kelembagaan dalam mewujudkan pengarusutamaan gender salah satunya yaitu kepemimpinan. Peranan pemimpin dalam mendukung program-

program pengarusutamaan gender melalui pengalokasian dana dan menjadikannya sebagai prioritas pembangunan dapat menjadi faktor penentu dalam perannya untuk mencapai keberhasilan tujuan bersama.

b. Komitmen Bersama

Pelaksanaan penguatan kelembagaan membutuhkan waktu yang lama dan komitmen bersama bagi semua pihak yang terlibat (Millen, 2004, p. 17). Komitmen bersama merupakan dasar bagi yang harus dipelihara dan dikembangkan secara baik. Pengaruh komitmen bersama sangat besar karena faktor inilah yang menjadi kerangka untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Fridah Ruth Tampake, B.Sc, S.Sos selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una bahwa :

“Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una dapat terlaksana melalui dukungan anggaran dari Bupati dan dukungan politis dari DPRD, selain itu seluruh OPD di Kabupaten Tojo Una mau diajak berpartisipasi dalam hal ini, serta keisutsertaan masyarakat juga tak boleh dilupakan” (wawancara dilakukan hari Senin tanggal 9 Januari pada Pukul 10.00-12.00 WITA)

Komitmen bersama dalam penguatan kelembagaan dalam mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una

tahun 2016-2017 terlihat dari dukungan dari Bupati dan DPRD Kabupaten Tojo Una-Una melalui dukungan anggaran dan politis terhadap perwujudan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una. Seluruh OPD dan komponen masyarakat di Kabupaten Tojo Una-Una mau diajak untuk ikut berpartisipasi dalam program pengarusutamaan gender sehingga memudahkan penguatan kelembagaan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa komitmen bersama telah menjadi faktor pendukung dalam penguatan kelembagaan dalam mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2017.

2. Faktor Penghambat

Reformasi Peraturan dan Reformasi Kelembagaan

Inilah faktor penghambat dalam penguatan kelembagaan dalam mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2017. Implementasi pengarusutamaan gender baru pertama kali dilaksanakan setelah menjadi salah satu misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021.

Pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una masih pada tahap awal sehingga belum peraturan khusus yang mengatur tentang pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una dan

banyak istilah-istilah yang bahkan masih asing dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Fridah Ruth Tampake, B.Sc, S.Sos selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una bahwa :

“terhambatnya penguatan kelembagaan dalam mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una adalah belum adanya peraturan dari kepala daerah tentang pengarusutamaan gender itu sendiri dan masih asingnya pelaksanaan pengarusutamaan gender disini dan pemahaman pengarusutamaan gender memang masih sangat minim bahkan istilah-istilah seperti PPRG, data terpilah dan forum data masih sangat aneh pada awalnya” (wawancara dilakukan hari Senin tanggal 9 Januari 2018 pada pukul 10.00-12.00)

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa minimnya peraturan, pemahaman dan pengetahuan tentang pengarusutamaan gender telah menjadi kelemahan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una dalam upaya penguatan kelembagaan dalam mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2017. Sehingga faktor penghambat dalam upaya mewujudkan pengarusutamaan gender adalah perlunya reformasi peraturan dan reformasi kelembagaan.